

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik: Edisi Revisi IV*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Badrulzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. 2001. Bandung: Alumi.

Fuady, Munir, dalam M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2001. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. 1987.

Surabaya: Bina Ilmu.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2004. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*.

Jakarta: Prenada Media.

Lontoh, Rudhy A.. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit*, Bandung:

Alumni.

M. Hadi Subhan. 2014. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:

Liberty.

Miru, Ahmad dan Sakka Pati. 2016. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal*

*1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. 2006. Bandung: Alumni.

Prasastinah, Usanti Trisadini, dan Leonora Bakarbesy. 2013. *Hukum Jaminan*.

Surabaya: Revka Petra.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. 1982.

Bandung: Alumni.

Sastrawidjaja, Man S. 2014. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*

*Pembayaran Utang*. Jakarta: Alumni.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Hukum Kepailitan, Sejarah, Asas, dan Teori*.

Jakarta: Prenadamedia Group.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*

*Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan*

*Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No.*

*37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pusataka Utama Grafiti.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

*Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. 2005. Jakarta: Intermasa

Sudirman, A. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence): Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sumardjono, Maria S.W. 1996. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*. 2010. Jakarta: Sofmedia.

Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. 2009. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. 1999. Bandung: Alumni.

Waluyo, Bernadette. 1999. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Bandung: CV Mandar Maju.

Yani, Ahmad, & Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis; Kepailitan*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. HASIL PENELITIAN/ TUGAS AKHIR**

Kartika. 2009. *Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V.*

*Melawan PT Argo Pantes, Tbk. Dalam Perkara Kepailitan*, Tesis, Jakarta:

Universitas Indonesia.

Nugroho, Ndaru Nur Sigit. 2013. *Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara*.

Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Rahmi, Adhani. 2015. *Analisis Yuridis Kedudukan Kreditor Konkuren dan*

*Kreditor Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

*(PKPU) (Studi Kasus: PT Benangsari Indahtexindo)*, Skripsi, Jakarta:

Universitas Indonesia.

## **C. MAKALAH/PIDATO**

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 1994. *Pembangunan Sistem Hukum*

*Nasional Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Seminar.*

Dalam : Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta, 25-29 Juli.

Lontoh, Rudy A. dkk. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit Alumni.

S., Ellyana. 1998. *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Makalah. Dalam : Lokakarya Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, 3-14 Agustus.

#### **D. INTERNET**

Hukumonline.com, 2018. *Perbedaan Das Sollen dengan Das Sein*, [internet] [diunduh Juni 2018], Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5acd738a592ef/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i>.

Rosyid, Abdul. 2017. *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam* [internet] [diunduh Agustus 2017]; Tersedia pada: <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>.

#### **E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Wetboek van Koophandel voor Indonesie*

(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak  
Tanggungjawab atas Tanah beserta Benda - Benda yang berkaitan dengan  
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42),  
diundangkan di Jakarta pada Tanggal 9 April 1996.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  
Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168),  
diundangkan di Jakarta pada Tanggal 30 September 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 39) diundangkan Di Jakarta pada Tanggal 25 Maret 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  
dan Penundaan Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 131) diundangkan Di Jakarta pada Tanggal 18 Oktober  
2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan  
Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85), diundangkan di Jakarta pada  
Tanggal 17 Juli 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
157), diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009.